

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Kota Bandung merupakan sebuah kota metropolitan yang terletak di Provinsi Jawa Barat sekaligus Ibu Kota Jawa Barat. Kota Bandung terletak 140 km sebelah tenggara Jakarta serta merupakan kota terbesar untuk wilayah Jawa bagian Selatan. Kota Bandung terdiri dari 30 kecamatan yang dibagi lagi menjadi 151 kelurahan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan organisasi/lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Satuan kerja perangkat daerah menjadi pemeran utama dalam hal menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penyusunan akhir Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD).

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, satuan kerja perangkat daerah diberi anggaran alokasi dana serta barang dan aset yang dibutuhkan. Pada tingkat pemerintah daerah, satuan kerja yang bertanggung jawab menyelenggarakan akuntansi adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dapat berupa Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) maupun berupa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Dalam transaksi sebagai satuan kerja dan transaksi sebagai pemerintah daerah, satuan kerja pengelola keuangan daerah menyusun laporan keuangan sebagai kantor pusat. Saat akhir tahun, laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan cara membandingkan laporan keuangan dari setiap satuan kerja perangkat daerah bersama dengan laporan keuangan yang dikerjakan oleh fungsi satuan kerja pengelola keuangan daerah. Penyusunan laporan keuangan seperti ini disebut sebagai sistem desentralisasi.

Kota Bandung telah banyak mendapatkan berbagai prestasi dan inovasi dengan tujuan untuk membangun peningkatan wilayah Kota Bandung agar lebih maju dan lebih baik lagi. Namun, jika dilihat dari sisi akuntabilitas terhadap satuan kerja

perangkat daerah, Kota Bandung belum dapat menyeimbangkan dalam penyajian laporan keuangan secara maksimal. Bahwasannya hasil pemeriksaan opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dalam bpk.go.id, Kota Bandung baru mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk pertama kalinya pada tahun 2018. Belum dapat dipastikan pemerintah daerah tersebut telah berkinerja dengan baik walaupun pemerintah daerah telah mendapatkan predikat opini audit yang baik, namun jika kinerja penyelenggara pemerintah daerahnya sudah baik, maka dapat dipastikan bahwa opini yang didapatkan pasti baik. Hal ini menjadi pertimbangan untuk penulis dalam memilih Kota Bandung sebagai objek penelitian.

## **1.2 Latar Belakang**

Dalam era reformasi saat ini, terdapat berbagai macam perubahan regulasi pengelolaan keuangan dari waktu ke waktu. Saat ini, laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah masih dianggap belum mampu untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakainya. Kurangnya informasi yang diperlukan dalam proses pelaporan keuangan pemerintah dapat menghambat kualitas pelaporan yang akan didapatkan. Maka dari itu, akuntansi keuangan daerah berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah agar berjalan sesuai dengan yang sudah dianjurkan.

Saat ini, pemerintah harus melaksanakan pelaporan keuangan pusat/daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengurus dan mengatur segala urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat. Menurut PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila didalamnya terdapat kriteria yang sudah disesuaikan dalam akuntansi pemerintahan yaitu relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dapat dipahami (*understanding*), dan dapat dibandingkan (*comparability*). Laporan keuangan memiliki tujuan umum yaitu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No.1 mendefinisikan laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan Daerah merupakan suatu bentuk tanggung jawab berupa laporan pengelolaan keuangan daerah dalam suatu periode tertentu. Dalam pengelolaan laporan keuangan sektor publik, para pengguna memerlukan informasi yang terkait dengan laporan keuangan untuk membantu memberikan keputusan serta diadakannya evaluasi atas penggunaan anggaran-anggaran oleh pemerintah. Laporan keuangan yang berkualitas akan menunjukkan bahwa pemerintah telah menggunakan anggaran sesuai dengan wewenang yang diberikan dalam pengelolaan pelaksanaan tanggung jawab.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan laporan keuangan yang entitas pelaporannya telah dikonsolidasi oleh Satuan Kinerja Pemerintah Daerah (SKPD). Menurut PSAP Nomor 1, LKPD memiliki beberapa komponen yaitu: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penyusunan laporan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah yang sesungguhnya. Menurut PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila didalamnya terdapat kriteria yang sudah disesuaikan dalam akuntansi pemerintahan yaitu relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dapat dipahami (*understanding*), dan dapat dibandingkan (*comparability*). Laporan keuangan memiliki tujuan umum yaitu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan.

LKPD akan mendapatkan pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) pada setiap tahunnya. Jika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bisa dikatakan bahwa LKPD tersebut diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa terdapat lima jenis opini audit yang akan diberikan, yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),

Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar, dan Opini tidak Tidak Memberikan Pendapat.

Laporan keuangan pemerintah daerah akan mendapatkan pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) pada setiap tahunnya. Jika Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), bisa dikatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah tersebut diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa terdapat lima jenis opini audit yang akan diberikan, yaitu: opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, opini wajar dengan pengecualian (WDP), opini tidak wajar, dan opini tidak memberikan pendapat.

Data dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2019 menunjukkan bahwa satuan kerja perangkat daerah yang berada di Kota Bandung pada tahun 2012 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian, tahun 2013 mendapatkan opini tidak memberikan pendapat serta pada tahun 2014-2017 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian dari BPK. Hal itu dikarenakan adanya laporan senilai Rp 694miliar yang nilainya tidak wajar serta terdapat aset senilai Rp 430 miliar yang belum diketahui keberadaannya. Dalam Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung mendapatkan banyak opini wajar dengan pengecualian secara berturut-turut dibandingkan Kab. Bandung, Kota Tasikmalaya, Kab. Pangandaran, Kota Bogor, dan Kota Cirebon.

**Tabel 1.1**

**Laporan Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018**

Provinsi Jawa Barat						
No.	Entitas Pemerintah Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kab. Bandung	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
2.	Kota Tasikmalaya	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

*(Bersambung)*

### *Sambungan*

3.	Kab. Pangandaran	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
4.	Kota Bogor	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
5.	Kota Cirebon	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
6.	Kota Bandung	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP

*Sumber:* Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK Semester I 2019

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan data diatas mengenai laporan keuangan Kota Bandung tahun 2014-2017 menunjukkan bahwa terdapat kegiatan yang belum sesuai dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual terhadap APBD/APBN. Adapun temuan BPK terkait pertanggungjawaban laporan keuangan Kota Bandung yaitu adanya rincian dalam pertanggungjawaban pelaporan keuangan pemerintah yang tidak jelas, kebijakan pelaporan keuangan pemerintah berbasis akrual yang tidak jelas, serta kurangnya pengelolaan sumber daya manusia dalam melaksanakan penerapan pelaporan keuangan pemerintah berbasis akrual.

Penyajian laporan keuangan yang berkualitas dapat dikatakan berhasil apabila penataan laporan keuangan telah terstruktur berdasarkan sistem akuntansi keuangan daerah yang berlaku. Menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007 menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Permendagri No. 13, 2006; 16-17 yaitu tertib, taat akan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab, keadilan, kepatuhan, serta adanya manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

Laporan keuangan pemerintah mempunyai tujuan dalam menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan mengenai posisi laporan keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan serta pelaporan sumber daya yang

telah diberikan. Oleh karena itu, penyajian informasi yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan harus sangat diperhatikan agar dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik. Informasi yang dibutuhkan juga harus memiliki beberapa karakteristik yang sudah ditetapkan dalam PP 71 tahun 2010 mengenai kriteria yang sudah disesuaikan dalam akuntansi pemerintahan yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan oleh pengguna.

Penelitian yang dilakukan oleh Aditya (2017), Reno (2017), Eka; Akran; dan Budi (2017), Ikrar (2018); dan Yasma; Noer; dan Andy (2019) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik dan benar sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Iskandar Muda (2017) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dikarenakan adanya ambiguitas yang tidak mempengaruhi.

Keberhasilan dalam pelaporan keuangan tidak hanya terlihat hanya dari sistem akuntansi keuangan daerah saja, namun penyajian laporan keuangan juga harus mengikuti perkembangan standar akuntansi pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan. Saat ini, Pemerintah Indonesia sudah menetapkan standar akuntansi pemerintah yang akan dipakai saat penyajian laporan keuangan pusat/daerah yaitu standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia. Menurut Susilawati dan Riana (2014) menyebutkan bahwa standar akuntansi digunakan oleh akuntan keuangan di pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih baik lagi untuk para pengguna dan pemeriksa laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tuti dan Defi (2017), Rindu (2018), Nurlis (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada penerapan standar akuntansi pemerintahan akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Inggrid (2016) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dikarenakan sebagai variabel pemoderasi mampu memperkuat SPIP pada kualitas laporan keuangan.

Kompetensi sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen yang terpenting dalam membantu dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk tercapainya suatu tujuan yang diberikan. Hasibuan Dala R. Supomo dan Eti Nurhayati (2018:6) berpendapat bahwa sumber daya manusia merupakan suatu ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Tho'in (2016) berpendapat bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan keterampilan, serta karakteristik kepribadian yang mempengaruhi langsung terhadap kinerja yang dilakukan serta dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan. Kompetensi sumber daya manusia menjadi dasar seseorang dalam mencapai kinerja untuk menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Sebelumnya, sumber daya manusia akan dinilai dari latar belakang pendidikan, pelatihan apa saja yang sudah diikuti, dan keterampilan apa yang dimiliki. Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting didalam suatu organisasi sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi dan kompetensi menjadi acuan untuk menentukan keberhasilan tersebut. Maka dari itu, kompetensi sumber daya manusia yang tinggi akan menentukan kualitas kompetitif dalam penyusunan pelaporan keuangan pemerintahan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ni Made; Agung; dan I G.A. Budiasih (2015), Dadang (2015), Liani dan Kusmuriyanto (2017), dan Irgal (2017)

menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik daerah, semakin tinggi tingkat kompetensi sumber daya manusia maka pengelolaan barang milik daerah semakin baik. Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rofiana; Raden Andi; dan Yosefa (2017) menyebutkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak memiliki hubungan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dikarenakan perilaku oportunistik akan mendorong individu berperilaku tidak etis untuk meningkatkan *self-interest*.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah diuraikan serta kesimpulan yang didapat melalui penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung)**.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Terkait dengan adanya perubahan regulasi pada penggunaan standar akuntansi pemerintahan, pada tahun 2013 terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruwal di Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual secara penuh paling lambat tahun anggaran 2015. Dalam hal ini, pemerintah diharuskan mampu menyajikan laporan keuangan sesuai dengan informasi keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan penerapannya, beberapa pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat masih belum mampu menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah secara maksimal. Hal ini dapat diperjelas dengan hasil temuan BPK terkait

pertanggungjawaban laporan keuangan mengenai kebijakan laporan keuangan berbasis akrual yang belum dapat dijalankan secara maksimal dan rincian pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak jelas menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, standar akuntansi pemerintahan, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada satuan kerja perangkat daerah di Kota Bandung, maka penulis mengidentifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, standar akuntansi pemerintahan, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada satuan kerja perangkat daerah di Kota Bandung?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada satuan kerja perangkat daerah di Kota Bandung?
4. Bagaimana pengaruh secara parsial standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada satuan kerja perangkat daerah di Kota Bandung?
5. Bagaimana pengaruh secara parsial kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada satuan kerja perangkat daerah di Kota Bandung?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan latar belakang yang sudah dijelaskan dan uraian mengenai rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada satuan kerja perangkat daerah di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, standar akuntansi pemerintahan, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada satuan kerja perangkat daerah di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada satuan kerja perangkat daerah di Kota Bandung?
4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada satuan kerja perangkat daerah di Kota Bandung?
5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada satuan kerja perangkat daerah di Kota Bandung?

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang telah membacanya mengenai hal-hal yang termuat di dalamnya. Untuk itu, penelitian ini memberikan manfaat yang mencakup beberapa hal yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memicu dan memberikan wawasan serta pengetahuan yang lebih mendalam bagi penulis mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## 2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada satuan kerja perangkat daerah Kota Bandung mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan referensi dalam penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.

### **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum penelitian, latar belakang penelitian dengan membahas mengenai fenomena yang terjadi, perumusan masalah berdasarkan latar belakang penelitian, tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Bab ini diakhiri dengan penjelasan sistematika penulisan tugas akhir yang menjelaskan secara ringkas mengenai isi dari masing-masing bab.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memberikan penjelasan mengenai tinjauan pustaka penelitian yang dapat dijadikan sebagai referensi serta informasi tambahan dalam penelitian. Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian-penelitian sebelumnya serta dikaitkan dengan kerangka pemikiran, maka diajukan hipotesis penelitian yang akan diuji pada penelitian. Bab ini diakhiri dengan penjelasan batasan dari variabel-variabel yang dibahas pada penelitian ini.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara peneliti melakukan penelitian. Dimulai dari bagaimana karakteristik penelitian, alat pengumpulan seperti apa yang digunakan peneliti untuk meneliti variabel, termasuk pada tahapan-tahapan,

populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, serta teknik analisis data yang digunakan peneliti. Bab ini diakhiri dengan penjabaran dari pengujian hipotesis yang akan digunakan peneliti dalam menguji penelitian.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah dalam analisis data dan bagaimana hasil analisis data yang telah diperoleh menggunakan alat analisis yang diperlukan serta pembahasan hasil penelitian yang diperoleh.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang telah diperoleh peneliti dari penelitian yang dilakukan. Selain itu, peneliti juga memberikan saran yang diharapkan dapat berguna bagi peneliti selanjutnya.